

GEBRAKAN KOSTER MEMBANGUN BALI DIAPRESIASI OMBUDSMAN

Jum'at, 15 Februari 2019 - Dewa Made Krisna Adhi

Koster ditemani oleh Sekda Bali Dewa Made Indra dan beberapa staf lainnya. Kedatangan Gubernur Bali Wayan Koster disambut langsung oleh Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab bersama dengan komisioner Ombudsman lainnya.

Menurut Umar, pihaknya selaku lembaga pengawasan publik sangat mengapresiasi gebrakan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam membangun Bali. "Pak Gubernur Bali, sekalipun masih beberapa bulan memimpin tetapi sudah membuat banyak gebrakan dan dampaknya sangat terasa. Salah satunya yang kami dengar adalah soal penerimaan pegawai, soal mutasi pegawai, kenaikan eselon dan sebagainya. Kami mendengar kalau hal itu dilakukan secara sangat transparan, tidak ada lagi transaksi," ujarnya.

Hal lain yang sangat berdampak adalah Pergub tentang timbunan sampah plastik, dimana sekarang mall, toko, minimarket, sudah tidak lagi menawarkan sampah plastik. "Saya sempat pantau itu. Juga sempat belanja di awal-awal. Kasir tidak memberikan kantong plastik walau saya memintanya. Saya terpaksa harus membaya barang sendiri," ujarnya.

Koster sudah menunjukkan konsistensinya untuk membangun Bali dengan visi dan misinya yang sangat brilian. Saat ini pun pelayanan publik di Bali masuk dalam zona hijau. "Survei kepatuhan Bali tahun 2017, Bali zero maladministrasi. Surveinya di Denpasar dan Buleleng sebagai sample. Kalau bisa ini dipertahankan," ujarnya.

Menurut Umar, secara umum, Gubernur Bali telah menunjukkan komitmennya sesuai dengan janjinya saat kampanye. Hal lain yang cukup berdampak adalah komitmen untuk memberantas pungutan liar. Meski menurutnya saat ini Bali masuk dalam zona hijau indeks pelayanan publik nasional, Ia berharap pemerintahan Koster-Ace bisa meningkatkan lagi pelayanan publik sehingga bisa lebih baik.

Pada kesempatan itu Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan publik. Yang pertama Gubernur mengapresiasi keberadaan Ombudsman dalam fungsi pengawasan pelayanan publik. Ia mengaku senang ada pihak yang mengawasi pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi.

"Biasanya apa yang saya lakukan saya konsultasikan dulu diskusi dulu secara administratif, bagaimana ketaatan terhadap peraturan dan kualitas pelayanan," ujarnya. Ia menambahkan kualitas pelayanan ini terkait dengan kecepatan, sesuai dengan aturan dan tak ada keluhan atau zero complaint.

â€Koster mengatakan dalam visinya sudah menetapkan lima program prioritas seperti pangan, sandang, papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan tenaga kerja; adat, agama, tradisi, seni dan budaya; serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Gubernur Koster akan membuat beberapa program, peraturan dan standarisasi untuk menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Misalnya untuk menjamin keamanan pangan, pihaknya akan bekerjasama dengan BPOM, sementara dari sisi lingkungan ada peraturan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir.

â€Anggota ORI Pusat Ahmad Alamsyah Saragih SE yang juga hadir dalam pertemuan ini memuji komitmen Gubernur Bali Wayan Koster yang menurutnya pelayanan publik ramah lingkungan. Namun Alamsyah juga mengingatkan perlunya memenuhi kebutuhan pelayanan publik paling dasar yang berkaitan dengan 'orang kecil.